



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bphlhk.jabalnusra@gmail.com

12 Agustus 2024

For Immediate Release

Narahubung: Agus Mardiyanto
HP. 081325147531

**GAKKUM KLHK MENANGKAP DPO PENAMPUNG & PEMODAL KAYU ILEGAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Surabaya, 12 Agustus 2024. Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra berhasil mengamankan buronan dalam Perkara Tindak Pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berinisial S bin S.

Tersangka inisial S bin S ini ditangkap di Dusun Sumberejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember oleh Tim Operasi Balai Gakkum LHK Jabalnusra dan Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah 7 bulan menjadi buron.

Sebelumnya pada bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, tersangka telah melakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan/atau setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin menyampaikan, "Kami akan terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang terkait, sehingga pengembangan kasus tersebut dapat dibuka jelas guna kepentingan penegakan hukum dan menekan peredaran hasil hutan secara ilegal."

###

DOKUMEN KEGIATAN





###